Laporan Kegiatan
Policy Talks
Siapa Mengawasi Para Menteri? Reformasi Akuntabilitas Eksekutif

Hari, Tanggal tayang	Selasa, 20 Mei 2025
Tempat	Zoom Meeting
Waktu	14.00 – 15.30 WIB
Pembicara	Felia Primaresti, Peneliti Politik The Indonesian Institute (TII) Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman Republik Indonesia)

Ringkasan

Pada Selasa, 20 Mei 2025 telah diadakan Policy Talks secara daring dengan judul ”Siapa Mengawasi Para Menteri? reformasi Akuntabilitas Eksekutif” yang merupakan diseminasi penelitian Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih. Diskusi ini menghadirkan Felia Primaresti, Peneliti Politik The Indonesian Institute (TII) dan Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman Republik Indonesia).

Tim dari TII membuka acara dengan pemaparan hasil pemeringkatan terhadap 48 menteri berdasarkan lima indikator utama: **komunikasi publik**, **pencapaian Key Performance Index (KPI)**, **kolaborasi antar-aktor**, **konsistensi kebijakan**, dan **inklusi serta partisipasi publik**. Dari hasil evaluasi tersebut, indikator komunikasi publik menempati peringkat tertinggi dengan skor 77,6 persen. Tingginya skor ini didorong oleh aktivitas media sosial para menteri, walaupun aspek kualitas isi dan kecepatan respons dinilai masih kurang, hanya mencapai 64,5 persen.

Sementara itu, indikator pencapaian KPI menempati urutan kedua dengan skor 60,9 persen. Rendahnya pencapaian ini dipahami sebagai konsekuensi dari waktu kerja yang masih singkat—baru sekitar 200 hari—serta dari kompleksitas struktur beberapa kementerian baru yang belum rampung membentuk sistem internalnya. Indikator kolaborasi mendapat skor 55,7 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar menteri masih bekerja secara sektoral dan tidak membangun sinergi lintas kementerian maupun dengan masyarakat sipil. Banyak kementerian dinilai masih mengadopsi pola kerja birokratis yang hirarkis, tanpa pelibatan aktor akar rumput.

Konsistensi kebijakan berada pada urutan keempat dengan skor 44,27 persen. Kebijakan pemerintah dinilai sering fluktuatif dan tidak konsisten, banyak yang bersifat populis dan mudah berubah karena tekanan publik. Salah satu contohnya adalah kebijakan kenaikan PPN dan pengaturan subsidi gas LPG 3 kg yang ditarik kembali akibat kritik masyarakat. Indikator dengan skor terendah adalah inklusi dan partisipasi publik, yaitu 42,7 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan masih minim dan cenderung bersifat formalitas belaka. Komunikasi yang dibangun pun cenderung satu arah—dari pemerintah ke publik—tanpa membuka ruang dialog yang sejati.

Selanjutnya, Endi dari Ombudsman Republik Indonesia memberikan paparan kunci dalam diskusi ini. Ia menyoroti pentingnya mengubah mandat publik—yang diberikan melalui pemilu dan pembayaran pajak—menjadi bentuk **akuntabilitas** yang konkret. Menurutnya, akuntabilitas itu hanya bisa diwujudkan melalui dua pilar utama: **partisipasi publik** dan

pengawasan publik. Ia menjelaskan bahwa partisipasi harus bersifat *meaningful*—tidak cukup hanya dengan hadir atau didengarkan, tetapi juga harus dipertimbangkan dan dijelaskan dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, pemerintah justru lebih sering merespons hal-hal yang viral di media sosial daripada masukan substantif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara *noise* dan *voice* dalam pengambilan kebijakan.

Endi juga menyoroti berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti inefisiensi, tumpang tindih tugas, hingga maladministrasi yang belum terselesaikan. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024 saja, Ombudsman telah menerima 10.757 laporan masyarakat, di mana sekitar 90 persen telah diselesaikan. Laporan-laporan ini sebagian besar berkaitan dengan masalah pertanahan dan tata ruang, kepegawaian ASN, serta jaminan sosial—terutama untuk pekerja informal. Berbeda dari lembaga seperti BPK yang bekerja berdasarkan audit internal dan evaluasi perencanaan, Ombudsman bekerja berbasis pengaduan masyarakat secara langsung.

Isu lainnya yang turut dibahas dalam forum ini adalah tentang **tingkat partisipasi anak muda** dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Survei menunjukkan bahwa meskipun minat generasi muda terhadap isu ekonomi seperti pekerjaan dan upah layak cukup tinggi, perhatian mereka terhadap isu kebijakan publik atau politik masih terbatas. Namun, bentuk partisipasi alternatif seperti unggahan media sosial, petisi daring, dan judicial review justru cukup marak di kalangan muda. Endi mencermati bahwa bentuk perlawanan ini muncul karena generasi muda kurang percaya pada kanal partisipasi formal, atau merasa tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara bermakna.

Dalam penutup paparannya, Endi mengkritik pendekatan efisiensi anggaran pemerintah yang cenderung menyasar lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman. Ia mengingatkan bahwa efisiensi yang salah sasaran justru bisa melemahkan fungsi kontrol dan akuntabilitas publik. Ia menegaskan bahwa reformasi akuntabilitas eksekutif tidak cukup hanya dengan membangun indikator kinerja, tetapi memerlukan pembenahan mendasar: memperluas ruang partisipasi, memperkuat lembaga pengawas, dan membangun budaya politik yang terbuka terhadap koreksi dari warga.

Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab yaitu:

Peserta dari berbagai latar belakang menyampaikan pertanyaan dan refleksi kritis terhadap materi yang telah disampaikan. Salah satu peserta menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam kebijakan publik, dan bertanya bagaimana mendorong pelibatan yang lebih bermakna. Endi menjawab bahwa banyak proses partisipasi di Indonesia masih bersifat prosedural, dan untuk membuatnya substansial dibutuhkan reformasi sistem konsultasi publik yang lebih terbuka dan tidak hanya formalitas belaka.

Pertanyaan lain datang dari peserta yang prihatin dengan kurangnya transparansi lembaga-lembaga pemerintah dalam menanggapi kritik. Ia mempertanyakan sejauh mana Ombudsman memiliki kekuatan untuk menindaklanjuti kasus-kasus maladministrasi secara efektif. Endi menjelaskan bahwa Ombudsman memang tidak memiliki kewenangan pemaksaan seperti lembaga penegak hukum, namun memiliki kekuatan moral dan legitimasi hukum untuk mendorong perbaikan. Dalam banyak kasus, rekomendasi Ombudsman berhasil memengaruhi kebijakan atau tindakan lembaga yang dilaporkan.

Ada pula pertanyaan mengenai keterlibatan anak muda dalam pengawasan dan pengaduan. Seorang peserta muda menanyakan bagaimana membangun kesadaran generasi muda untuk berani melapor dan mengambil bagian dalam proses akuntabilitas publik. Menanggapi hal ini, Endi menyatakan bahwa pendidikan warga (citizenship education) harus diperkuat, tidak hanya melalui kurikulum formal tetapi juga melalui kampanye publik yang mengajak anak muda untuk berani bersuara dan memahami hak-haknya sebagai warga negara.

Di akhir, Endi menegaskan kembali bahwa tantangan terbesar dalam reformasi akuntabilitas eksekutif bukan hanya terletak pada kelemahan sistem, tetapi juga pada kurangnya keberanian dan kesadaran kolektif untuk memantau, mengkritik, dan menuntut perbaikan dari mereka yang memegang kekuasaan.